

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kementerian di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, termasuk penggabungan, pemisahan, perubahan nama, serta pembubaran baik sementara maupun permanen. Jumlah kementerian selalu bervariasi di setiap kabinet, dari belasan hingga pernah mencapai ratusan. Baru pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ditetapkan bahwa jumlah kementerian maksimal adalah 34. Pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan faktor politik, ideologi, dan etnis.

Kementerian negara Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan, berkedudukan di Jakarta, dan berada di bawah tanggung jawab Presiden. Tujuan pembentukan kementerian adalah untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Setiap kementerian memiliki bidang khusus yang menangani urusan tertentu, dengan tugas dan fungsi yang berbeda.

Kementerian negara Indonesia memiliki peran yang sangat beragam dalam perencanaan, administrasi, dan operasional negara di bawah pengawasan langsung Presiden. Menteri bertugas untuk memajukan negara sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara. Fungsi kementerian mencakup:

1. **Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan:** Menyusun, menetapkan, dan menjalankan kebijakan di bidangnya.
2. **Pengelolaan Barang Milik Negara:** Mengelola aset negara yang menjadi tanggung jawabnya.

3. **Pengawasan:** Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidangnya.
4. **Aktivitas Teknis:** Melaksanakan kegiatan teknis dari pusat hingga daerah.

Selain itu, kementerian juga bertanggung jawab untuk:

1. **Koordinasi Kebijakan dan Program:** Mengikuti dan mengkoordinasikan jalannya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
2. **Penyelesaian Masalah:** Menangani masalah yang timbul dan mencari solusinya, serta mengikuti perkembangan kondisi di bidangnya.
3. **Kerjasama Antar Lembaga:** Berkoordinasi dengan direktur jenderal dan pimpinan lembaga lain untuk mengatasi masalah terkait bidangnya.

Tugas utama kementerian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Salah satu kementerian penting dalam struktur pemerintahan Indonesia adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan desa-desa di Indonesia, terutama yang tertinggal dan terpencil. Perannya mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan aset, pengawasan, serta kegiatan teknis di bidang pembangunan desa dan transmigrasi.

Kementerian Desa memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi lokal. Hal ini termasuk penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta

pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain Kementerian Desa, terdapat 33 kementerian lain di Indonesia yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan bidangnya. Contohnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan dan kebudayaan, serta riset dan teknologi di Indonesia. Kementerian ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, melestarikan budaya, dan mendorong inovasi melalui riset dan pengembangan teknologi.



Gambar 1. 1 Logo Resmi Kementerian RI Kabinet Kerja

(Sumber: Achmad, 2019)

Di atas merupakan logo dari seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Setiap logo melambangkan identitas unik dan tugas khusus yang diemban oleh masing-masing kementerian dalam menjalankan fungsinya untuk memajukan negara. Kementerian-kementerian ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari urusan dalam negeri, luar negeri,

kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan desa dan transmigrasi. Logo-logo tersebut juga mencerminkan visi dan misi kementerian yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjalankan kebijakan pemerintah secara efektif. Logo kementerian yang ditampilkan ini dikutip dari *Nusantara News*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bersama dengan 33 kementerian lainnya, memainkan peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang beragam untuk mendukung pembangunan nasional. Setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi spesifik, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang fokus pada pengembangan pendidikan dan inovasi, atau Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat.

Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif antara kementerian, lembaga, dan masyarakat sangat krusial. Komunikasi yang baik memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Komunikasi dalam kehidupan manusia menjadi salah satu peranan penting, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan adanya suatu interaksi untuk saling bergantung satu sama lain.

Komunikasi dalam kehidupan manusia menjadi salah satu peranan penting, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan adanya suatu interaksi untuk saling bergantung satu sama lain. Komunikasi yang menghubungkan manusia ialah komunikasi interpersonal. Mulyana (2000) menjelaskan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang yang bertatap muka, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non verbal. Komunikasi interpersonal bisa dibagi menjadi tiga kategori: keterlibatan, kontrol, dan kelekatan. Keterlibatan merujuk pada kebutuhan untuk menjaga kepuasan dalam hubungan dengan orang lain, memiliki rasa

saling memiliki, dan berinteraksi yang cukup. Kontrol adalah kebutuhan untuk mempengaruhi, menunjukkan kekuatan, dan otoritas. Sedangkan kelekatan mencakup kebutuhan untuk menjalin persahabatan, kedekatan, dan cinta. (Suhanti et al., 2018). Jika komunikasi berjalan dengan lancar tentu hubungan antar manusia pun akan semakin baik.

Sama halnya dengan suatu pekerjaan, pastinya untuk mengembangkan suatu bidang tentu dibutuhkan komunikasi verbal dengan memiliki hubungan yang baik terutama pada bagian *public relations*. Karena *public relations* menjadi ujung tombak pembangun citra, dan pengembangan kepercayaan dalam suatu organisasi. Menurut Soegiardjo (dalam Gassing & Suryanto, 2016), *Public Relations* adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, menyesuaikan kebijakan dan prosedur organisasi atau individu dengan kepentingan publik, serta menjalankan program aksi untuk mendapatkan pemahaman dan persetujuan dari publik. Selain itu, Public Relations berperan penting dalam mengumpulkan informasi terkini seperti kondisi, peraturan, dan data, merencanakan program, serta menjalin hubungan baik secara eksternal maupun internal.

*Public relations* di Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menjadi salah satu peranan penting untuk mengembangkan pelayanan dan kerjasama baik kepada kementerian/lembaga, masyarakat maupun luar negeri. Rachmadi (2010) menyatakan bahwa *public relations* Merupakan lanjutan dari proses penetapan kebijakan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok, sehingga lembaga atau perusahaan tempat *Public Relations* beroperasi dapat memperoleh kepercayaan dari publik. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, *Public Relations* perlu mendapatkan kepercayaan tinggi dalam pemerintahan agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan mudah dan menjalankan fungsinya secara maksimal.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban kegiatan magang di Universitas Multimedia Nusantara, laporan ini disusun berdasarkan pengalaman magang di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selama magang, penulis ditempatkan sebagai *public relations* di bagian Kerjasama divisi Lintas Kementerian/Lembaga pada Biro Perencanaan dan Kerjasama. Tugas-tugas penulis mencakup membantu memberikan pelayanan yang optimal melalui komunikasi yang efektif dengan pihak internal maupun eksternal, mengumpulkan data dan informasi melalui korespondensi untuk keperluan internal, serta membantu pengembangan ide dalam merencanakan program kerja pemerintah.

Beberapa mata kuliah yang dipelajari penulis selama di Universitas Multimedia Nusantara sangat relevan dengan tugas-tugas yang diemban selama magang. Mata kuliah *Communication and Personal Relationships* sangat membantu dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Pemahaman yang diperoleh dari mata kuliah ini memungkinkan penulis untuk lebih efektif dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, serta memahami dinamika hubungan antar individu dalam konteks profesional. Hal ini sangat penting dalam memastikan komunikasi yang harmonis dan produktif di lingkungan kerja.

Selain itu, mata kuliah *Intro to Corporate Communications dan Writing for Public Relations* memberikan dasar yang kuat dalam menyusun dan mengelola komunikasi korporat serta menghasilkan materi komunikasi yang tepat dan efektif. Pengetahuan dari mata kuliah ini sangat berguna dalam menyusun korespondensi, laporan, dan materi komunikasi lainnya yang diperlukan dalam tugas penulis di bagian Kerjasama. Keterampilan menulis yang baik dan memahami prinsip-prinsip komunikasi korporat membantu penulis menyampaikan informasi dengan jelas dan profesional kepada pihak internal dan eksternal.

Mata kuliah *Investor & Government Relations* juga sangat relevan dengan tugas penulis dalam mengumpulkan data dan informasi serta membantu pengembangan ide untuk program kerja pemerintah. Pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan investor, serta bagaimana mengelola komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, membantu penulis dalam memahami konteks kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keterampilan yang diperoleh dari mata kuliah ini memungkinkan penulis untuk lebih efektif dalam berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan memastikan bahwa program kerja pemerintah dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan baik.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Maksud dari aktivitas pelaksanaan kerja magang ini secara umum ialah sebagai gambaran mengenai tanggung jawab dari profesi *public relations* pada divisi Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan di Biro Perencanaan dan Kerjasama. Oleh karenanya, maksud dan tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Memperoleh pengalaman dalam merencanakan program kerja dan mengorganisir kegiatan yang berkaitan dengan bagian Kerjasama divisi Lintas Kementerian/Lembaga.
2. Memahami secara langsung proses komunikasi yang dilaksanakan dalam *public relations* selama kegiatan yang berkaitan dengan pihak internal maupun eksternal.
3. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan tugas laporan pada bagian Divisi Kerjasama.

## **1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

Proses magang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh program studi Komunikasi Strategis, Universitas Multimedia Nusantara,

dengan total durasi enam ratus empat puluh jam kerja. Adapun rincian tempat dan waktu pelaksanaan magang adalah sebagai berikut::

Tempat : Kementrian Desa Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Alamat : Jl. 6, Jl. TMP. Kalibata No.17, RT.6/RW.7,  
Rawajati, Kec.Pancoran, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

No. Telepon : (021) 1500040

Website : <https://kemendes.go.id/>

Jam Kerja : 08.00 – 16.00 (senin – jumat)

Bagian : Divisi Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan

Penanggung Jawab : Eko Supriyatin, SE

No. Telepon : +62 838-7019-4229

